

LKJIP 2027

DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KEPULAUAN ANAMBAS



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala petunjuk dan ridhanya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini disesuaikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025.

Laporan ini juga sebagai media informasi atas capaian kinerja yang terukur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja dengan pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Serta menyajikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi harus senantiasa dikendalikan, dimonitoring dan dievaluasi agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025. Semoga bermanfaat.

Tarempa, 12 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



ABDUL KASIR, S.T., M.Si

Pembina Tk I / IV.b

NIP. 19750120 200312 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dalam mewujudkan tujuan sasaran strategis dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas;
2. Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai;
3. Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah.

Adapun Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi;
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah;
4. Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik;
5. Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2022 didukung dengan adanya kerjasama yang solid di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dan masih ada target yang masih belum dapat di capai oleh dikarenakan masih kurang fokusnya kinerja yang maksimal guna mencapai hal tersebut.

Adapun beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dan perlu solusi dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di masa yang akan datang.

- a. Kendala dan hambatan :
 - a. Paradigma lebih kepada "Output" yang dihasilkan daripada "Outcome";
 - b. Masih kurangnya kualitas evaluasi internal dinas;
 - c. Pemanfaatan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - d. Lokasi pembangunan berada pada lahan hutan produksi/lahan restan (transmigrasi);
 - e. Infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik masih belum memadai;
 - f. Besarnya biaya dalam pembangunan layanan telekomunikasi di bandingkan dengan provit income;

- g. Masih kurangnya Peran masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur;
- h. Masih minimnya pemahaman seluruh stakeholder terkait data pemetaan dalam penyusunan Dokumen SPBE;
- i. Sulitnya koordinasi dalam mewujudkan sinergitas untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan SPBE;
- j. Adanya pergantian admin pembantu yang ditunjuk di PPID pembantu sehingga terjadi kurangnya pemahaman dalam menjalankan kewajiban;
- k. Kurangnya koordinasi antara admin pembantu dan admin utama PPID;
- l. Kurangnya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut admin Utama kepada Admin Pembantu;
- m. Belum optimalnya koordinasi antara Pembina Data, Koordinator Data dan Wali Data;
- n. Masih belum terdistribusinya pembagian tugas secara proporsional;
- o. Belum adanya kesadaran dari Perangkat Daerah terkait pentingnya peran Statistik Sektoral;
- p. Kurang respon dalam proses pengumpulan data dari Produsen Data;
- q. Masih menggunakan sistem manual dalam melakukan pengumpulan data;
- r. Belum adanya Tata kelola keamanan informasi;
- s. Belum adanya kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut;
- t. Belum adanya kesiapan penerapan pengelolaan resiko, keamanan informasi sebagai dasar penerapan keamanan strategi informasi;
- u. Belum tersedianya kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya; dan
- v. Belum tersedianya kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

2. Solusi :

- a. Lebih menelaah kepada apa yang menjadi kewajiban dalam bekerja dalam menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga terukur kinerja akuntabilitasnya;
- b. Perlu dilakukannya analisis terhadap akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan, penganggaran dan target kinerja yang akan di hasilkan;
- c. Perbaiki manajemen kinerja Dinas agar Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bisa memberi masukan untuk perbaikan

manajemen kinerja di tahun yang akan datang;

- d. Pemerintah daerah membantu memfasilitasi ketersediaan fasilitas pendukung dalam pembangunan layanan telekomunikasi;
- e. Melakukan sinergi bersama pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung pembangunan layanan telekomunikasi;
- f. Meningkatkan pengetahuan kepada stakeholder akan pentingnya SPBE dalam pembangunan daerah;
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan SPBE pemerintah daerah secara berkala;
- h. Perlu adanya pembinaan kepada admin utama dan pembantu PPID yang berkesinambungan dalam menjalankan kewajibannya;
- i. Membentuk Forum satu data tingkat kabupaten guna mengintensifkan koodinasi dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- j. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
- k. Melakukan sosialisasi terkait alur penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
- l. Menyediakan Perangkat Pengacak Sinyal/Jammer dalam pemenuhan nilai indeks KAMI;
- m. Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (BSRE); dan
- n. Membuat kebijakan daerah terkait pelaksanaan keamanan informasi; dan
- o. Melakukan kolaborasi kepada bidang terkait dalam menjalankan pengamanan informasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4.1 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.....	6
1.4.2 Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.....	7
1.4.3 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.....	7
1.4.4 Bidang Penyelenggaraan e – Government.....	8
1.4.5 Bidang Statistik dan Persandian.....	9
1.4.6 Kelompok Jabatan Fungsional.....	10
1.5 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11
1.5.1 Sumber Daya Dinas.....	11
1.5.2 Aset atau Modal.....	15
1.6 Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah“	26
2.1.1. Kabupaten Maritim Terdepan.....	26
2.1.2. Berdaya Saing, Maju.....	26
2.1.3. Berakhlakul Karimah.....	27
2.2 Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.....	30
2.2.1 Tujuan dan Sasaran.....	30
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	36
2.4 Program dan Kegiatan.....	39
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	39
B. Program Informasi dan Komunikasi Publik.....	40
C. Program Aplikasi Informatika	41
D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	41
E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.....	41
2.5 Perjanjian Kinerja.....	42
2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja	45
“Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Target) * 100 %”.....	45

3.1.1	Capaian Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2025.....	46
3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025.....	47
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD.....	49
3.1.4	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan.....	50
	/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Di Lakukan	50
3.1.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
a.	Keuangan	53
3.1.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	55
1.1	Sasaran 1.1 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	56
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai.....	58
2.1	Sasaran 2.1 : Meningkatkan Perluasan Layanan Telekomunikasi.....	58
3.	Tujuan 3 : Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	59
3.1	Sasaran 3.1 : Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	60
3.2	Sasaran 3.2 : Meningkatkan Pelayanan Data dan Statistik.....	61
3.3	Sasaran 3.3 : Meningkatkan Kinerja Sistem Persandian Daerah	62
3.2	Realisasi Anggaran.....	63
BAB IV PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70
1.6.1	116,5%/(tercapai melebihi target);.....	70
1.6.2	/(tercapai melebihi target).....	70
B.	Rekomendasi	71
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK.....		Error! Bookmark not defined.
JAPRIZAL, S.Kom., MA.....		Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan memperaktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya integritas, koordinasi yang baik, professional, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mencakup urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sesuai RKPD Tahun 2025, guna mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), serta

pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan tuntas dengan didukung manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan berintegritas maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja serta dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan serta Perundang-undangan yang digunakan sebagai latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
26. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

27. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dimaksud untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang ditugaskan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam tahun anggaran 2024, selain itu laporan ini juga sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan di tahun yang akan datang.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

Persandian. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Diskominfo;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Diskominfo;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- d. Bidang Statistik dan Persandian;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.2 Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Berdasarkan tugas tersebut sekretariat memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas administrasi dinas sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b. Koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang -undangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.3 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik merupakan Unit Kerja Dinas

Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan informasi publik, pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.4 Bidang Penyelenggaraan e – Government

Bidang Penyelenggaraan e-Government merupakan Unit Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), layanan data center (DC), pengintegrasian jaringan dan komunikasi data, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan informasi e-Government, dan system komunikasi intra pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan e-Government, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan e-government;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan e-government;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan e-government;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penyelenggaraan e-government;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.5 Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian merupakan Unit Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan, pengelolaan data statistik sektoral dan persandian.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian.

Dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang statistic dan persandian;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Statistik dan Persandian terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional di unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari kelompok jabatan fungsional sebagai berikut :

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi;
- c. Koordinator dan subkoordinator melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada setiap pengelompokan uraian fungsi.

1.5 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

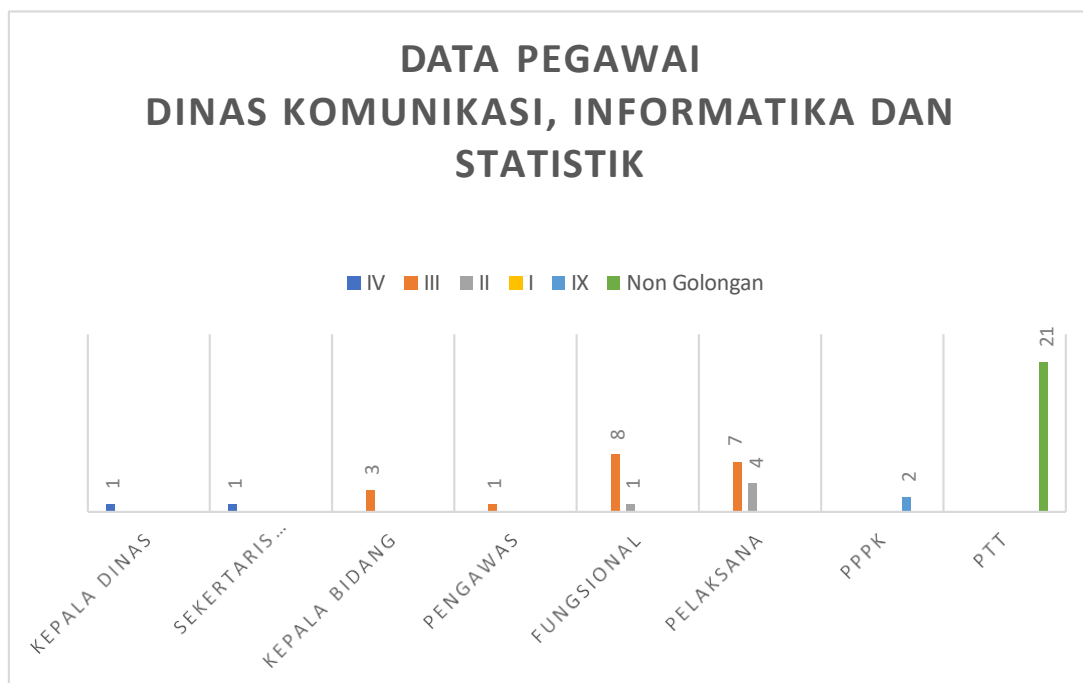
1.5.1 Sumber Daya Dinas

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Per Desember 2025

No	Jabatan	Golongan Ruang						Non Golongan	Jumlah
		IV	III	II	I	IX	V		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-		-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-	-	-	-		-	1
3	Kepala Bidang	-	3	-	-	-		-	3
4	Pengawas	-	-	-	-	-		-	4
5	Fungsional	-	8	1	-	-		-	9
6	Pelaksana	-	7	4	-	-		-	11
7	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Full Waktu	-	-	-	-	21		-	21
8	Pegawai Pemeintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	-	-	-	-	1		-	1
Jumlah		2	19	5	0	22		-	49

Gambar 1
Diagram Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025



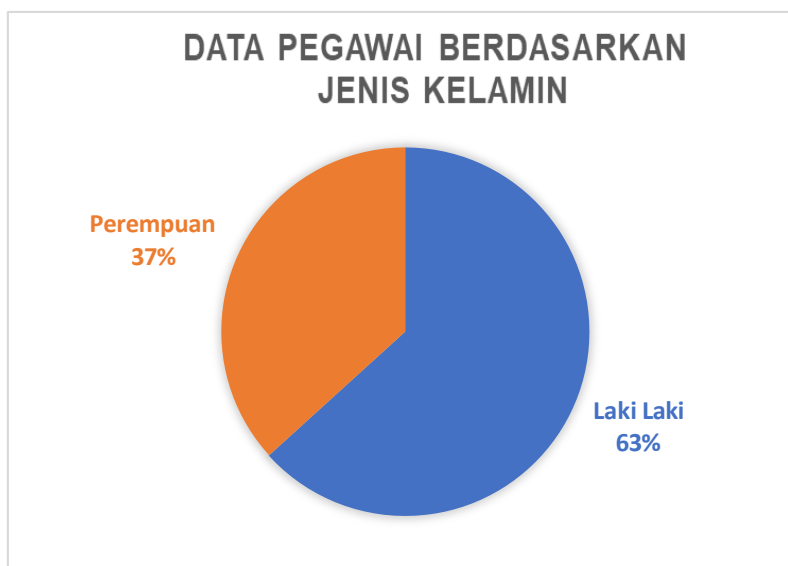
Sumber Gambar 1 : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

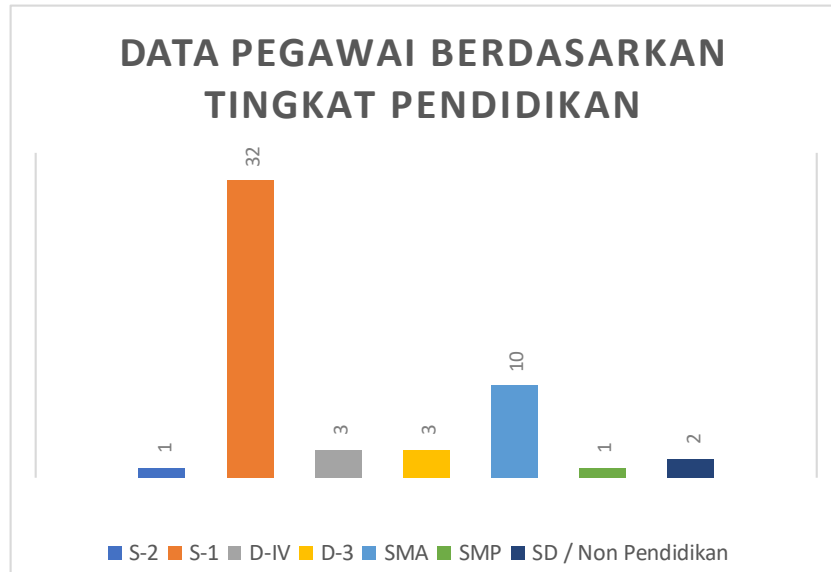
Adapun kondisi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang terdiri dari laki-laki sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dan perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan tingkat pendidikan akhir bervariasi mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S2). Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kabupaten Kepulauan Anambas
 Per 31 Desember 2025

Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan						
	Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-4	D-3	SMA	SMP	SD/ Non Pendi dikan
49	29	20	4		-	4	10	1	1

Gambar 2
 Grafik Jenis Keamin dan Tingkat Pendidikan Apatur
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kabupaten Kepulauan Anambas



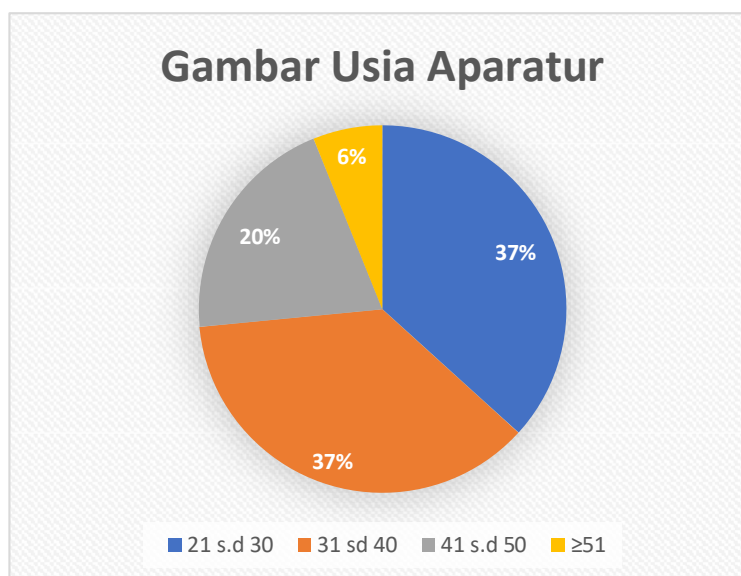


Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas cukup bervariasi dengan rentang usia 21 s.d 30 tahun yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang, rentang usia 31 s.d 40 tahun yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang, rentang usia 41 s.d 50 tahun yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang dan rentang usia ≥ 51 tahun yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Usia Aparatur
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per 31 Desember 2024

Jumlah	Usia Aparatur			
	21 s.d. 30	31 s.d. 40	41 s.d. 50	≥ 51
49	18	18	10	3

Gambar 3
Grafik Usia Aparatur
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas belum mencukupi seluruh pelayanan yang harus dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas di urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.5.2 Aset atau Modal

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dilengkapi dengan peralatan meubelair kantor yang masih cukup baik, namun untuk peralatan kantor seperti komputer sudah mulai mengalami ketertinggalan akibat kemajuan penggunaan sistem informasi yang menuntut penggunaan teknologi yang lebih muktahir.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan mobilitas kerja setiap harinya.

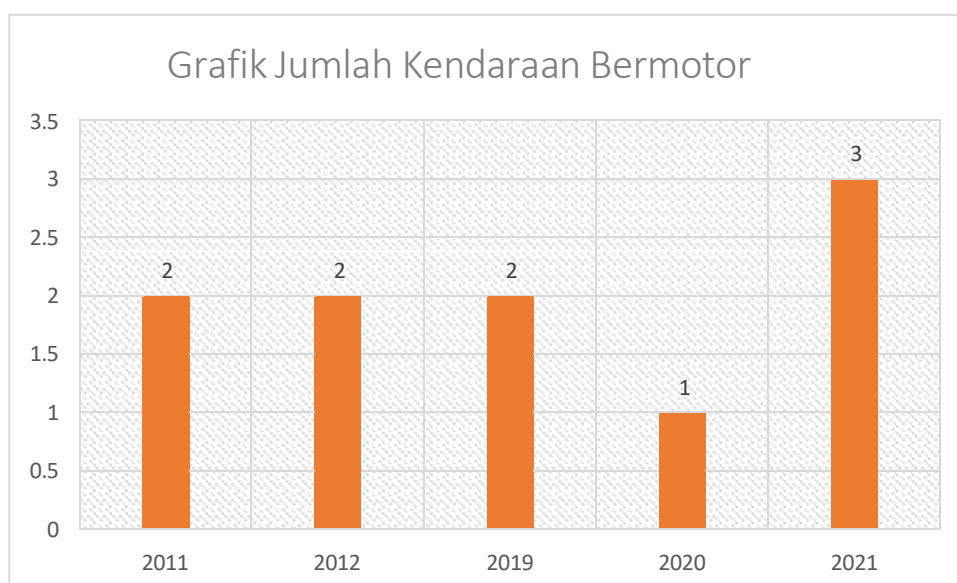
Di dukung pula dengan kendaraan operasional (Roda Dua dan Roda Empat) yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Adapun kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 14 (empat belas) unit, terdiri atas kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan rusak berat dan kendaraan roda dua sebanyak 13 (tiga belas) unit dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Data Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per 31 Desember 2024

No	Merk	No Plat	No Rangka	No Mesin	STNK	BPKB	Keterangan
1	Yamaha Jupiter MX	BP 4157 S	MH3565001BK58047	56S-058056	Ada	Ada	Hibah dari Bag. Umum
2	Yamaha Jupiter MX	BP 4162 S	MH31S7006AK63056 1	1S7-630588	Ada	Ada	Hibah dari Bag. Umum
3	Yamaha Jupiter MX	BP 4170 S	MH31S7006AK63124 8	1S7-631425	Ada	Ada	Hibah dari Bag. Umum
4	Honda New Megapro	BP 2054 S	MH1KC3119BK12382 4	KC31E11247 39	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2011
5	Honda Vario Cbs	BP 2055 S	MH1JF9116CK72750 2	JF91E17225 78	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2012
6	Honda Spacy	BP 2053 S	MH1JF0218BK118484	JF02E11229 06	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2011
7	Honda Vario Cbs	BP 2056 S	MH1JF9116CK72846 1	91F1722996	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2012
8	Mitshubishi X-Pander	BP 1031 S	MK2NCWLANKJ0006 92	4A91HC372 5	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2019

9	Honda PCX	BP 2102 S	MH1KF2117KK134399	KF21E11340 00	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2019
10	Yamaha NMAX	BP 4560 S	MH3SG3192LJ00515 9	G3E4E - 2057739	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2020
11	Kawasaki KLX	BP 6002 S	MH4LX150CCKP4700 4	LX150CEP72 288	Ada	Ada	Hibah dari BPKPD
12	Honda PCX	BP 2122 S	MH1KF8115MK01159 3	KF81E10116 00	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2021
13	Honda PCX	BP 2120 S	MH1KF7116MK04444 9	KF81E10444 45	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2021
14	Honda PCX	BP 4500 S	MH1KF7117MK04288 6	KF71E10429 62	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2021

Gambar 4
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Adapun aset tetap Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas terhitung sampai 31 Desember 2024 sejumlah Rp. 18.190.070.184,00. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Aset Tetap Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per 31 Desember 2024

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	18.190.070.184,00
1.3.1	TANAH	165.404.000,00
1.3.1.01	TANAH	165.404.000,00
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	29.905.000,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	29.905.000,00
1.3.1.01.01.04.19	Tanah Bangunan Menara Pengawas/Tower/Lalu Lintas Darat,Laut,Udara	29.905.000,00
1.3.1.01.03	LAPANGAN	135.499.000,00
1.3.1.01.03.04	TANAH LAPANGAN PEMANCAR DAN STUDIO ALAM	127.699.000,00
1.3.1.01.03.04.03	Tanah lapangan pemancar dan studio alam Lainnya	127.699.000,00
1.3.1.01.03.10	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN	7.800.000,00
1.3.1.01.03.10.02	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	7.800.000,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	8.604.077.948,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	558.754.435,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	558.754.435,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	339.794.435,00
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	339.794.435,00
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	218.960.000,00
1.3.2.02.01.09.01	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	218.960.000,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	33.198.000,00
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	20.295.000,00
1.3.2.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	9.295.000,00
1.3.2.03.01.02.02	Mesin Bor Tangan	2.310.000,00
1.3.2.03.01.02.08	Mesin Gergaji Besi	6.985.000,00
1.3.2.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	4.400.000,00
1.3.2.03.01.06.12	Gergaji Chain Saw	4.400.000,00
1.3.2.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	6.600.000,00
1.3.2.03.01.09.10	Reciver	6.600.000,00
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5.995.000,00
1.3.2.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5.995.000,00
1.3.2.03.02.05.01	Tool Kit Set	5.995.000,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	6.908.000,00
1.3.2.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	6.908.000,00
1.3.2.03.03.07.10	Scanner (Universal Tester)	6.908.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.493.529.745,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	714.382.520,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	191.904.100,00
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	14.685.000,00
1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	12.320.000,00

1.3.2.05.01.04.03	Rak Besi	89.844.600,00
1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	16.506.000,00
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	32.147.500,00
1.3.2.05.01.04.07	Brandkas	15.995.000,00
1.3.2.05.01.04.29	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	10.406.000,00
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	522.478.420,00
1.3.2.05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	383.772.500,00
1.3.2.05.01.05.03	Papan Visual/Papan Nama	5.940.000,00
1.3.2.05.01.05.05	White Board	9.955.000,00
1.3.2.05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas	17.993.000,00
1.3.2.05.01.05.12	Mesin Absensi	8.140.000,00
1.3.2.05.01.05.19	Alat Pemotong Kertas	2.860.000,00
1.3.2.05.01.05.43	LCD Projector/Infocus	36.025.000,00
1.3.2.05.01.05.77	Papan Pengumuman	31.192.920,00
1.3.2.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya	26.600.000,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	578.057.525,00
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	104.346.000,00
1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	50.600.000,00
1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	9.504.000,00
1.3.2.05.02.01.11	Meja Ketik	25.872.000,00
1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	13.090.000,00
1.3.2.05.02.01.50	Meubeleur lainnya	5.280.000,00
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	7.590.000,00
1.3.2.05.02.03.03	Mesin Pemotong Rumput	7.590.000,00
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	167.739.000,00
1.3.2.05.02.04.01	Lemari Es	5.896.000,00
1.3.2.05.02.04.03	A.C. Window	137.093.000,00
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	24.750.000,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	298.382.525,00
1.3.2.05.02.06.02	Televisi	151.747.525,00
1.3.2.05.02.06.08	Sound System	5.775.000,00
1.3.2.05.02.06.21	Camera Video	125.345.000,00
1.3.2.05.02.06.36	Tangga Aluminium	4.840.000,00
1.3.2.05.02.06.38	Dispenser	2.475.000,00
1.3.2.05.02.06.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8.200.000,00
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	201.089.700,00
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	16.887.000,00
1.3.2.05.03.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6.767.000,00
1.3.2.05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10.120.000,00
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	36.300.000,00
1.3.2.05.03.02.04	Meja Rapat Pejabat Eselon II	36.300.000,00

1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	85.895.700,00
1.3.2.05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	28.160.000,00
1.3.2.05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10.098.000,00
1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14.846.700,00
1.3.2.05.03.03.09	Kursi Kerja Pejabat lainnya	32.791.000,00
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	13.860.000,00
1.3.2.05.03.06.04	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	4.235.000,00
1.3.2.05.03.06.10	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	9.625.000,00
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	48.147.000,00
1.3.2.05.03.07.07	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	48.147.000,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.029.347.758,00
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	2.133.946.908,00
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	485.589.030,00
1.3.2.06.01.01.48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	475.470.000,00
1.3.2.06.01.01.84	Cable	2.640.000,00
1.3.2.06.01.01.96	peralatan studio audio lainnya (dst)	7.479.030,00
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1.595.357.878,00
1.3.2.06.01.02.03	Camera Electronic	31.879.238,00
1.3.2.06.01.02.16	Video Switcher	21.945.000,00
1.3.2.06.01.02.45	Tripod Camera	6.380.000,00
1.3.2.06.01.02.105	Layar Film/Projector	64.119.000,00
1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	95.150.000,00
1.3.2.06.01.02.130	Video Conference	194.150.000,00
1.3.2.06.01.02.157	Clipp On	12.430.000,00
1.3.2.06.01.02.164	Alat Studio Video Lainnya	1.169.304.640,00
1.3.2.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	53.000.000,00
1.3.2.06.01.06.01	Alat Studio Lainnya	53.000.000,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	618.145.850,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	120.854.000,00
1.3.2.06.02.01.06	Handy Talky (HT)	58.454.000,00
1.3.2.06.02.01.22	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	62.400.000,00
1.3.2.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	49.912.500,00
1.3.2.06.02.02.01	Unit Tranceiver Ssb Portable	49.912.500,00
1.3.2.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	157.265.350,00
1.3.2.06.02.04.04	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	157.265.350,00
1.3.2.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	47.100.000,00
1.3.2.06.02.07.05	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	18.900.000,00
1.3.2.06.07.20	Alat-alat sandi lainnya (dst)	28.200.000,00
1.3.2.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	26.468.000,00
1.3.2.06.02.08.47	Alat komunikasi khusus lainnya (dst)	26.468.000,00

1.3.2.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	216.546.000,00
1.3.2.06.02.11.01	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	216.546.000,00
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	277.255.000,00
1.3.2.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	16.280.000,00
1.3.2.06.03.07.03	Antene HF/SW Stationary	16.280.000,00
1.3.2.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	66.000.000,00
1.3.2.06.03.20.05	switcher/menara antena lainnya (dst)	66.000.000,00
1.3.2.06.03.47	SUMBER TENAGA	194.975.000,00
1.3.2.06.03.47.02	Genset	194.975.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	144.966.000,00
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	134.766.000,00
1.3.2.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	61.600.000,00
1.3.2.08.01.06.69	Trianle With Vorcelen Pipe Stems	61.600.000,00
1.3.2.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	17.391.000,00
1.3.2.08.01.17.23	Video Printer	17.391.000,00
1.3.2.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	55.775.000,00
1.3.2.08.01.41.192	Personal Computer	55.775.000,00
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	10.200.000,00
1.3.2.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	10.200.000,00
1.3.2.08.08.15.06	photo and film equipment lainnya (dst)	10.200.000,00
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	72.490.000,00
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	72.490.000,00
1.3.2.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	72.490.000,00
1.3.2.09.04.07.22	Layar Proyektor	72.490.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	3.224.360.010,00
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	806.199.775,00
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	797.179.775,00
1.3.2.10.01.02.01	P.C Unit	321.716.775,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	349.672.000,00
1.3.2.10.01.02.03	Note Book	110.831.000,00
1.3.2.10.01.02.10	Personal Komputer lainnya	14.960.000,00
1.3.2.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	9.020.000,00
1.3.2.10.01.03.01	Komputer Unit Lainnya	9.020.000,00
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	2.418.160.235,00
1.3.2.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	24.750.000,00
1.3.2.10.02.01.06	CPU (Peralatan Mainframe)	14.850.000,00

1.3.2.10.02.01.12	Hard Disk	9.900.000,00
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	12.848.000,00
1.3.2.10.02.02.09	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	9.900.000,00
1.3.2.10.02.02.16	Speaker Komputer	2.948.000,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	252.376.600,00
1.3.2.10.02.03.02	Monitor	8.085.000,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	69.051.600,00
1.3.2.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13.090.000,00
1.3.2.10.02.03.18	Peralatan Personal Komputer lainnya	162.150.000,00
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	1.912.109.635,00
1.3.2.10.02.04.01	Server	318.002.000,00
1.3.2.10.02.04.02	Router	290.125.000,00
1.3.2.10.02.04.33	Peralatan Jaringan lainnya	1.303.982.635,00
1.3.2.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	216.076.000,00
1.3.2.10.02.05.01	Peralatan Komputer lainnya	216.076.000,00
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	39.897.000,00
1.3.2.15.03	ALAT SAR	39.897.000,00
1.3.2.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	39.897.000,00
1.3.2.15.03.02.05	Tenda	39.897.000,00
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	7.535.000,00
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	7.535.000,00
1.3.2.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	7.535.000,00
1.3.2.19.01.02.01	Alat Tennis Meja	7.535.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.286.891.731,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	452.306.000,00
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	452.306.000,00
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	452.306.000,00
1.3.3.01.01.01.05	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	452.306.000,00
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	6.834.585.731,00
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	6.834.585.731,00
1.3.3.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	6.834.585.731,00
1.3.3.03.01.03.06	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	6.834.585.731,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2.097.537.005,00
1.3.4.03	INSTALASI	16.379.000,00
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	16.379.000,00
1.3.4.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	16.379.000,00

1.3.4.03.05.12.01	Instalasi pembangkit listrik lainnya	16.379.000,00
1.3.4.04	JARINGAN	2.081.158.005,00
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	2.081.158.005,00
1.3.4.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	2.081.158.005,00
1.3.4.04.03.05.01	Jaringan telepon lainnya	2.081.158.005,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	36.159.500,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	36.159.500,00
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	36.159.500,00
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	19.800.000,00
1.3.5.01.01.01.12	Buku Umum Lain-lain	19.800.000,00
1.3.5.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	7.859.500,00
1.3.5.01.01.07.10	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	7.859.500,00
1.3.5.01.01.11	BUKU LAPORAN	8.500.000,00
1.3.5.01.01.11.05	buku laporan lainnya (dst)	8.500.000,00
1.5	ASET LAINNYA	5.371.989.150,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	69.410.000,00
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	69.410.000,00
1.5.3.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	69.410.000,00
1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	69.410.000,00
1.5.3.01.01.05.01	Software	69.410.000,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	5.302.579.150,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	5.302.579.150,00
1.5.4.01.01	ASET LAIN-LAIN	5.302.579.150,00
1.5.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	5.302.579.150,00
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	5.302.579.150,00

Secara keseluruhan jumlah dan jenis sarana prasarana pendukung serta total aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas masih cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya namun untuk pemeliharaan sarana serta upgrade teknologi harus terus dilakukan guna mencukupi dan memenuhi sarana dan prasarana serta teknologi yang senantiasa up to date agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; dan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026, Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah lanjutan dari Visi pada Periode sebelumnya yakni :

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah“

yang disingkat menjadi **“ANAMBAS BERMADAH 2”**, kalimat Visi diatas mengandung 3 (tiga) kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Makna dari 3 (tiga) kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Kabupaten Maritim Terdepan

Kabupaten Maritim Terdepan yaitu berarti Kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul. Sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar- besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan Kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

2.1.2. Berdaya Saing, Maju

Berdaya Saing yaitu menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar

Kabupaten/Kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

Maju yaitu bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang. Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai. Dimana para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

2.1.3. Berakhlakul Karimah

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu, pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, dimana budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 4 (empat) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Program-program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terdiri dari :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah :
 - a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
 - d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
 - e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
 - f. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak- anak yatim piatu dan lansia terlantar.

2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata :
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen;
 - c. Menyalurkan Rp. 10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;
 - d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif.

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi :
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
 - c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp. 5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
 - d. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah :
 - a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
 - b. Menyediakan/ merehabilitasi 1.000 unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/ P3K, dan masyarakat tidak mampu;

- c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);
- d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan–Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025);
- e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

2.2 Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 - 2026 sebagai perumusan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan yang diinginkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas;
2. Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani jaringan Seluler dan atau Internet yang Memadai;
3. Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah.

Sedangkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi;
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah;
4. Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik;
5. Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah.

Indikator Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Sasaran ke 1 (satu) adalah Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel, yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas.

Sasaran ke 2 (dua) adalah Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi, yaitu :

- a. Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan.

Sasaran ke 3 (tiga) adalah Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah, yaitu :

- a. Persentase Pemenuhan Aspek SPBE; dan
- b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Sasaran ke 4 (empat) adalah Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik, yaitu :

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia.

Sasaran ke 5 (lima) adalah Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah, yaitu :

- a. Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.1

Keterkaitan Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2021-2026

Visi :				
Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4	5
1	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	<p>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas</p>
2	Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	<p>Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi</p> <p>Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan</p>
		Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	<p>Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Persentase Pemenuhan Aspek SPBE</p> <p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)</p> <p>Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</p>
			Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	
			Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	

Tabel 2.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	CC (58.00)	CC (59.00)	CC (60.00)	CC (62.00)	B (65.00)	B (67.00)
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	B (60.00)	B (61.00)	B (62.00)	B (63.00)	B (64.00)	B (65.00)
Meningkatkan Titik Lokasi /Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai		Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	92,59 %	96,30 %	100,00 %	-	-	-
	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	42,86%	71,43%	100,00%	-	-	-
Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	C (2,51)	C (2,53)	C (2,55)	C (2,58)	B (2,61)	B (2,63)
	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (83.00)	Menuju Informatif (84.00)	Menuju Informatif (85.00)	Menuju Informatif (86.00)	Menuju Informatif (87.00)	Menuju Informatif (88.00)

	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia	47,62%	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%
	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	80 (Tidak Layak)	175 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	200 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	240 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	290 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	320 (Cukup Baik)

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan rencana aksi kegiatan sebagai jawaban dan solusi atas permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Di dalam mendukung peningkatan pemerataan telekomunikasi guna mengurangi kesenjangan informasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan misi ke-3 (tiga) “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi “ dan ke-4 (empat) ”Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah”, oleh karena itu Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Telekomunikasi baik di Kecamatan maupun Desa;
3. Pembangunan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Jaringan Penunjang Dasar Telekomunikasi;
5. Menyusun Rencana Induk SPBE;
6. Meningkatkan Aplikasi Yang Terintegrasi;
7. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur TIK;
8. Meningkatkan Kualitas Informasi Dan Komunikasi Publik;
9. Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik;
10. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas;
11. Meningkatkan Keterbukaan Badan Publik;
12. Menyusun Pedoman Standar Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah;

13. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah; dan
14. Melaksanakan Pembinaan Keamanan Informasi dan Persandian Daerah.

Berdasarkan Strategi yang direncanakan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan Arah Kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi yang Komprehensif;
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan;
4. Penguatan Kualitas Layanan Telekomunikasi;
5. Penguatan Kapasitas Bandwidth;
6. Penguatan Jaringan Guna Memperkuat Kualitas Jangkauan Wilayah;
7. Penguatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
8. Penguatan Pengelolaan Kualitas Penyebaran Dan Pemerataan Informasi Publik;
9. Penguatan Ketersediaan Data Dan Informasi Sektoral Melalui Keterbukaan Informasi Publik; dan
10. Penguatan Persandian Dan Keamanan Informasi

Tabel 2.3

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi yang Komprehensif
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
			Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Telekomunikasi Baik di Kecamatan maupun Desa	Penguatan Kualitas Layanan Telekomunikasi
Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan	Penguatan Kapasitas Bandwidth
		Pembangunan Jaringan Penunjang Dasar Telekomunikasi	Penguatan Jaringan Guna Memperkuat Kualitas Jangkauan Wilayah
		Menyusun Rencana Induk SPBE	Penguatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		Meningkatkan Aplikasi Yang Terintegrasi	
		Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur TIK	
		Meningkatkan Kualitas Informasi Dan Komunikasi Publik	Penguatan Pengelolaan Kualitas Penyebaran Dan Pemerataan Informasi Publik
		Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik	
		Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas

		Meningkatkan Keterbukaan Badan Publik	Keterbukaan Informasi Publik
	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Menyusun Pedoman Standar Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah	Penguatan Persandian Dan Keamanan Informasi
		Meningkatkan Kapasitas Pengelola Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah	
		Melaksanakan Pembinaan Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah	

2.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu di tetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan tugas dan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk Kegiatan dan Sub kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh Enam) Sub Kegiatan ,sebagaimana berikut ini :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Relasi Media;
 - b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - c. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;

- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- e. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

C. Program Aplikasi Informatika

- 1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektora;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik

dan Non Elektronik;

2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.5 Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia/dikelola. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas program dan kegiatan tahun bersangkutan, melainkan termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud dari program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(64.00) B
2	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan	100%
3	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	75.00%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(87.00) Menuju Informatif

4	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	66.67%
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(290) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar

Tabel 2.5
Program Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.813.540.950,46
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.937.779.188,13
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 2.806.238.167,99
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 7.200.000,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 64.702.809,60
TOTAL		Rp. 11.629.461.116,18

2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Anggaran	Persentase Anggaran	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	5.813.540.950,46	49,99 %	Sekretariat
2	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	127.511.028,00	1,10%	Bidang Penyelenggaraan e-Government
3	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	2.678.727.139,99	23,03%	Bidang Penyelenggaraan e-Government
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	2.937.779.188,13	25,26%	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	7.200.000,00	0,06%	Bidang Statistik dan Persandian
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	64.702.809,60	0,56%	Bidang Statistik dan Persandian

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

3.1 Capaian Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Sehingga setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih dan selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{“Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) * 100 \%”$$

Apabila indikator sasaran mempunyai makna progress, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Capaian Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerjanya, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun
2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(64,00) B	(69,06) B	109,61%	Sangat Tinggi	Evaluasi Inspektorat KKA
2	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	75,00%	116,5%	155%	Sangat Tinggi	Penilaian Mandiri
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(87,00) Menuju Informatif	(94,66) Informatif	108,8%	Sangat Tinggi	Komisi Informasi
4	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	66,67%	100%	100%	Sangat Tinggi	Penilaian Mandiri
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(290) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(317) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	109,3%	Sangat Tinggi	Penilaian Mandiri
Rata-rata Capaian Strategis					113,79%	Sangat Tinggi	

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memproyeksikan capaian kinerja di tahun lalu, sebagai rekomendasi guna meningkatkan pencapaian target kinerja yang dilaksanakan ditahun yang akan datang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1								
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	(62,00) CC	(72,34) BB	116,67 %	(65,00) B		
Sasaran								
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(63,00) B	(69,06) B	109,61 %	(64,00) B		
Tujuan 2								
2	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai	Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Sasaran								
2.1	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %
Tujuan 3								
3	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(2,58) C	(3,04) B	116,47%	(2,61) C	(3,04) B	116,5%
Sasaran								
3.1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	62,50%	117,8%	160%	75,00%	116,5%	155%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(85,00) Menuju Informatif	(92,21) Informatif	108,5%	(87,00) Menuju Informatif	(94,66) Informatif	108,8%
3.2	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	61,90%	100%	161,5%	66,67%	100%	150%

3.3	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(240) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(286) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	119,2%	(290) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(317) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	109,3%
-----	---	--	---	---	--------	---	---	--------

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian %	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan 1						
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	(72,34) BB	(67,00) B	120%	Tercapai
Sasaran						
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(69,06) B	(65,00) B	106,24%	Tercapai
Tujuan 2						
2	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai	Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	100,00%	100,00%	100,00%	Tercapai
Sasaran						
2.1	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Tercapai
Tujuan 3						
3	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(3,04) B	(2,63) B	115.5%	Tercapai
Sasaran						
3.1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	116,47%	75,50%	155%	Tercapai

		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(94.66) Informatif	(88.00) Menuju Informatif	107,6%	Tercapai
3.2	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	100,00%	71,43%	139,99%	Tercapai
3.3	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(317) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(320) Cukup Baik	99,06%	Akan Tercapai

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Di Lakukan

Hasil analisis terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(64,00) B			

Peningkatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terkait hasil rekomendasi dan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, dilaksanakan guna perbaikan dan peningkatan keberhasilan capaian kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Baik

Analisis terhadap Indikator Desa Blank Spot :

Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Telekomunikasi melalui program percepatan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dari daerah pinggiran dan didukung peran Pemerintah Daerah dalam membantu memfasilitasi ketersediaan fasilitas pendukung dalam pembangunan layanan telekomunikasi.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	75,00%	116,5%	155%	Sangat Baik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(87,00) Menuju Informastif	(94,66) Informatif	108,8%	Sangat Baik

Analisis terhadap Indikator Pemenuhan Aspek SPBE :

Indikator capaian sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2019 Tentang SPBE yaitu :

- a. Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
- b. Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan
- c. Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi indikator 1 ini telah maka dilakukan kegiatan penyusunan dokumen :

- a. Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Arsitektur Layanan;
- c. Arsitektur Data dan Informasi;
- d. Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
- f. Arsitektur Keamanan Informasi SPBE; dan
- g. Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi indikator 2 ini telah maka dilakukan penyusunan dokumen prioritas berupa Peta Rencana Kegiatan SPBE.

Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi indikator 10 ini telah dilakukan penyusunan draft SK Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kepulauan Anambas dan Draft Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE.

Analisis terhadap Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik :

Berdasarkan kategori Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi telah diperoleh predikat Informatif. Namun ada parameter/kriteria yang mengalami penurunan nilai keberhasilan tersebut. Hal ini di sebabkan adanya mis komunikasi terkait pergantian admin pembantu di perangkat daerah dengan admin utama di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Sehingga menjadi kendala bagi admin pembantu dalam menjalankan kewajibannya yaitu ketidaktepatan waktu dalam mengupload dokumen oleh admin pembantu dan kurang optimalnya monitoring dan evaluasi yang menjadi tanggungjawab admin utama.

Alternatif Solusi yang harus dilakukan terhadap Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik :

Perlu dilakukan pembinaan kepada admin utama dan admin pembantu secara berkesinambungan, agar lebih menyadari apa yang menjadi tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajibannya guna pemenuhan nilai keterbukaan informasi publik.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	66,67%	100%	100%	Sangat Baik

Analisis terhadap Indikator Standar Data Indonesia (SDI) :

Tingkat ketercapaian yang dihasilkan karena koordinasi yang dilakukan secara intensif antar pemangku kepentingan antar Perangkat Daerah dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang didukung SDM yang berkompeten di bidangnya. Selain itu sudah terbentuk pola kerja dalam penyusunan laporan statistik sektoral dan metadata statistik.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(290) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(317) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	109,3%	Sangat Baik

Analisis Terhadap Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) :

Tata Kelola, Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset dan Teknologi dari unsur yang dinilai ada beberapa unsur yang belum tercapai, seperti unsur yang mengevaluasi kelengkapan konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi. Adapun keberhasilan dalam mencapai Indeks KAMI karena telah memenuhi kategori sistem elektronik dalam pemenuhan Kerangka Kerja Dasar. Tercapainya sasaran kinerja karena terdokumentasinya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keamanan informasi seperti pengamanan tanda tangan elektronik dan pengamanan perangkat keras dan lunak pada server Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 meliputi :

a. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka menunjang pencapaian yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merealisasikan penggunaan anggaran dalam mencapai target Sasaran Kinerja pada Tahun 2025 dengan pagu anggaran

Sebesar Rp. 11.629.461.116,18 - terealisasi sebesar Rp. 10.065.031.368,- (86,55%). Dengan demikian mengalami efisiensi sebesar Rp. 1.564.429.748,18,- (13,45%) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Anggaran 2025			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1									
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	(60,00) CC	(72,34) BB	120%	5.813.540 .950,46	4.884.994. 849	84,03%	15,97%
Sasaran									
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(64,00) B	(69,06) B	104,24%	5.813.540 .950,46	4.884.994. 849	84,03%	15,97%
Tujuan 2									

2	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai	Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
Sasaran									
2.1	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
Tujuan 3									
3	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(2,61) C	(3,04) B	117,8 %	2.806.238.167,99	2.457.564.982	87,57 %	12,43%
Sasaran									
3.1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	75,00%	117,8%	114,24%	2.806.238.167,99	2.457.564.982	87,57 %	12,43%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(85,00) Menuju Informatif	(92,21) Informatif	108,5%	2.937.779.188,13	2.672.014.337	90,95 %	9,05%
3.2	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	61,90%	100%	161,5%	7.200.000	5.700.000	79,17 %	20,83%
3.3	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(240) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(286) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	100,00%	64.702.809,60	44.757.200	69,17 %	30,83 %

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Indikator pengukuran sasaran dengan melakukan Pemenuhan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024, melalui Penilaian Mandiri dengan menggunakan lembar kerja dan data dukung yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Tujuan 1 (satu) didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
 Indikator Sasaran Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Program	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1										
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	(60.00) CC	(72,34) BB	120%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

1.1 Sasaran 1.1 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel

Indikator pengukuran sasaran dengan melakukan Pemenuhan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025, melalui data dukung yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Sasaran 1.1 (satu point satu) disupport oleh 6 (enam) Kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Indikator Sasaran Nilai AKIP
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kegiatan	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran										
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi	(64,00) B	(69,06) BB	104,24%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan	100%	100%	100%
		Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas					Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	100%	100%	100%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langgan Lainnya	100%	100%	100%

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	100%	100%
--	--	--	--	--	--	---	--	------	------	------

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai

Indikator pengukuran sasaran dengan meningkatkan titik lokasi desa yang masih belum dapat terjangkau layanan telepon seluler maupun internet di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Tujuan 2 (dua) disupport oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut.

Tabel 3.9

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Indikator Sasaran Persentase Desa Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Program	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 2									
2	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai	Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan SPBE Pemerintah yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	92,86%	100%	104,32%

2.1 Sasaran 2.1 : Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi

Indikator pengukuran sasaran dengan melakukan peningkatan guna memperluas layanan telekomunikasi di desa yang masih belum terlayani oleh sinyal telekomunikasi (blank spot) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah terpenuhi sejak tahun 2023.

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Sasaran 2.1 (satu point satu) disupport oleh 1 (satu) Kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Indikator Sasaran Persentase Desa yang Masih Blank Spot Terselesaikan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kegiatan	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran										
2.1	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi/ Perangkat Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah	-	-	-

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah

Indikator pengukuran sasaran dengan melakukan Pemenuhan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melalui data dukung yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB).

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Tujuan 3 (tiga) disupport oleh 4 (empat) Program, dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.11

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Indikator Sasaran Nilai Indeks SPBE
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Program	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 3										
3	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(2,58) C	(3,04) B	117,8 %	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan SPBE Pemerintah yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%
						Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektor	100%	100%	100%
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	19,35%	19,35%	100%

3.1 Sasaran 3.1 : Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah

Indikator pengukuran sasaran dengan melakukan Pemenuhan Aspek Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan secara mandiri guna melaksanakan pemenuhan terkait aspek dasar Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator pengukuran sasaran dengan melakukan pemenuhan Nilai Keterbukaan Informasi yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau.

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Sasaran 3.1 (tiga point satu) disupport oleh 3 (tiga) Kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut.

Tabel 3.12

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Indikator Sasaran Pemenuhan Aspek SPBE
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kegiatan	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran										
3.1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	62,50 %	117,8 %	160 %	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	100%	100%	100%
						Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah	60%	100%	166,67%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(85,00) Menuju Informatif	(92,21) Informatif	108,5%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Informasi yang Terpublikasi	100%	100%	100%

3.2 Sasaran 3.2 : Meningkatkan Pelayanan Data dan Statistik

Indikator pengukuran sasaran dengan melakukan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten yang dilakukan secara penilaian mandiri untuk melakukan :

1. Memberi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat

dipertanggungjawab, serta mudah di akses dan dibagipakaikan antara Perangkat Daerah;

3. Mendorong keterbukaan dan transparansi data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional.

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Sasaran 3.2 (tiga point dua) disupport oleh 1 (satu) Kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut.

Tabel 3.13

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Indikator Sasaran Persentase Organisasi Perangkat
Daerah yang Memenuhi SDI
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kegiatan	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran										
3.2	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	61,90 %	100 %	161,5 %	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

3.3 Sasaran 3.3 : Meningkatkan Kinerja Sistem Persandian Daerah

Indikator Pengukuran sasaran Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang dilakukan secara penilaian mandiri melalui Data dukung yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Guna mendukung Pencapaian Kinerja pada Sasaran 3.3 (tiga point tiga) disupport oleh 2 (dua) Kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut

Tabel 3.14

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Indikator Sasaran Nilai Indeks KAMI
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	2025			Kegiatan	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran										
3.3	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(240) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(286) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	119,16%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19,35%	19,35%	100,00 %
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	53,90 %	53,90 %	100,00 %

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selain faktor pendukung tersebut aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Hal ini karena operasionalisasi kegiatan hanya dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 sebesar Rp. 14.302.285.071,- (Empat belas milyar tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.866.222.659,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 76,10% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.436.062.412,- (Tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) atau sebesar 23,9% dan realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 94,73%.

Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan rencana pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Silpa
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	4.610.061.617	4.049.918.389	87,84%	560.143.228
2	Belanja Barang/Jasa	9.262.273.772	6.398.897.270	68,31%	2.863.376.502
3	Belanja Modal	429.949.682	417.407.000	79,68%	12.542.682
4	Silpa	-	3.436.061.412		
Jumlah		14.302.285.071	10.866.222.659		3.436.062.412
Hutang		-	1.659.096.378		

Gambar 5
Realisasi Anggaran Tahun 2024



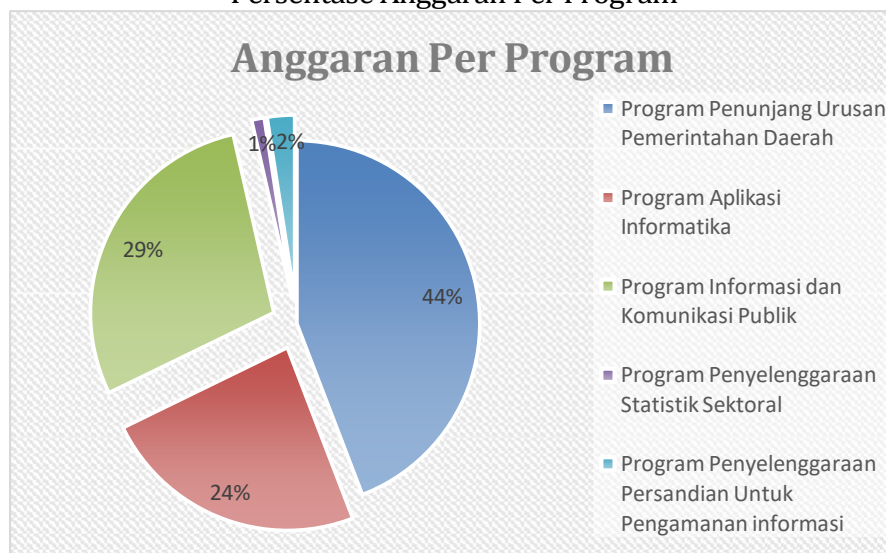
Sumber Gambar 5 : Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Belanja yang Mendukung Sasaran Strategis
(IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.813.540.950,46	4.884.994.849	84,03%	15,97%
2	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Program Aplikasi Informatika	2.806.238.167,99	2.457.564.982	87,57%	12,43%
3	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.937.779.188,13	2.672.014.337	90,95 %	9,05%
4	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	7.200.000,00	5.700.000	79,17%	20,83%
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	64.702.809,60	44.757.200	69,17%	30,83%

Gambar 6
Persentase Anggaran Per Program



Sumber Gambar 6 : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 3.17

Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2024		Realisasi	Efisiensi
		Keuangan	Fisik		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.813.540.950,46	84,03	99,39	4.884.994.849	928.546.101,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.870.500	56,44	100	6.700.000	5.170.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.870.500	56,44	100	6.700.000	5.170.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.067.773.299,46	86,52	99,80	4.384.421.699	683.351.600,46
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.781.913.299,46	86,05	99,61	4.114.751.699	667.161.600,46
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	285.860.000	94,34	100,00	269.670.000	16.190.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.549.000	96,79	100	46.023.000	1.526.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.549.000	96,79	100,00	46.023.000	1.526.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.932.600	60,51	97,29	274.086.020	178.846.580
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.934.962	80,25	100,00	7.972.762	1.962.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.684.380	00,00	-	0	4.684.380
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.752.152	57,38	100,00	8.464.068	6.288.084
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.319.732	27,08	100,00	12.000.816	32.318.916

Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	52.979.722	45,61	81,00	24.165.840	28.813.882
Fasilitas Kunjungan Tamu	10.001.000	0,00	100,00	0	10.001.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.260.652	70,03	100,00	221.482.534	94.778.118
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.223.712	100,00	100,00	25.223.712	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.223.712	100,00	100,00	25.223.712	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.358.658	80,96	100,00	146.831.942	34.526.716
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.948.295	93,52	100,00	58.866.295	4.082.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.701.546	47,24	100,00	27.256.830	30.444.716
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.708.817	100,00	100,00	60.708.817	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.833.181	6,37	98,61	1.708.476	25.124.705
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.723.181	10,22	97,22	1.708.476	15.014.705
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000	0,00	100,00	0,00	10.110.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.937.779.188,13	90,95	100,00	2.672.014.337	265.764.851,13
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.937.779.188,13	90,95	100,00	2.672.014.337	265.764.851,13
Relasi Media	2.812.000.000,13	92,54	100,00	2.602.341.437	209.658.563,13
Pelayanan Informasi Publik	9.787.300	100,00	100,00	9.787.300	-
Monitoring Informasi, Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	-	-
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	115.991.888	51,63	100,00	59.885.600	56.106.288
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-	-	-
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.806.238.167,99	87,58	100,00	2.457.564.982	348.673.185,99

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	127.511.028	99,29	100,00	126.600.000	911.028
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	127.511.028	99,29	100,00	126.600.000	911.028
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.678.727.139,99	87.02	100,00	2.330.964.982	347.762.157,99
Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	18.526.900	47,61	100,00	8.820.800	9.706.100
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah	10.546.000	79,67	100,00	8.401.800	2.144.200
Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	53.196.000	16,66	100,00	8.861.800	44.334.200
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.596.458.239,99	88,77	100,00	2.304.880.582	291.577.657,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	7.200.000	26,39	100,00	5.700.000	1.500.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7.200.000	26,39	100,00	5.700.000	1.500.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	7.200.000	79,17	100,00	5.700.000	1.500.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	64.702.809,60	69,17	100,00	44.757.200	19.945.609,60
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.723.129,60	68,58	100,00	40.274.800	18.448.329,60

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	58.723.129,60	68,58	100,00	40.274.800	18.448.329,60
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5.979.680	74,96	100,00	4.482.400	1.497.280
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.979.680	74,96	100,00	4.482.400	1.497.280
TOTAL	11.629.461.116,18	71,62	99,88	10.065.031.368	1.564.429.748,18

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ditentukan dari hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD tahun 2025.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kelemahan dan kekurangan tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 didukung dengan adanya kerjasama yang solid di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai sasaran yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang di jabarkan melalui Rencana Kerja setiap tahunnya.

Adapun capaian target Indikator Sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas : **Nilai B (64,00)** realisasi capaian **Nilai B (69,06)/(tercapai melebihi target);**
2. Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan : **100%** realisasi capaian **100%/(tercapai);**
3. Persentase Pemenuhan Aspek SPBE : **75,00%** realisasi capaian **1.6.1 116,5%/(tercapai melebihi target);**
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik : **87,00 (Menuju Informatif)** realisasi capaian **94,66 (Informatif) / (tercapai melebihi target);**
5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI) : **66,67%** realisasi capaian **100%/(tercapai melebihi target);**
6. Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) : **290 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)** realisasi capaian **317 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar) 1.6.2 / (tercapai melebihi target).**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dengan kualitas pelaksanaan baik. Hal ini terlihat pada capaian indikator kinerja utama/sasaran dengan nilai rata-rata persentase sebesar **113,79 %**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kategori capaian **SANGAT BAIK**.

B. Rekomendasi

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif diperlukan strategi terukur, antara lain :

1. Meningkatkan pemantauan evaluasi, dan pelaporan secara intens terkait penyediaan konten, pengelolaan media, penguatan kapasitas komunikasi publik, dan penyediaan layanan informasi;
2. Perlu adanya Sekretariat PPID dalam bentuk pelayanan offline di admin utama maupun admin pembantu sehingga dalam melaksanakan tugas, sehingga diharapkan menjadi lebih aktif dan optimal;
3. Lebih diperkuat sinergitas terkait urusan dokumentasi dan publikasi antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik) dengan Bagian Protokol Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah;
4. Untuk mencapai Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Daerah perlu dilakukan evaluasi melalui tim SPBE tingkat Kabupaten;
5. Mempercepat pengesahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE;
6. Memanfaatkan Gedung NOC untuk menunjang pelayanan Perangkat Daerah;
7. Mendorong Penyelenggara Telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan akses telekomunikasi seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan TIK;
8. Meningkatkan kepercayaan stakeholder pengguna data terhadap data sektoral yang sudah di publikasikan melalui website statistik dan buku statistik sektoral;
9. Membuat kajian-kajian ataupun survey dalam mendukung peran Statistik

Sektoral dan Keamanan Informasi;

10. Melakukan Koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi pemenuhan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI);
11. Mempercepat pembuatan regulasi penerapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kabupaten Anambas; dan
12. Mempercepat proses pengurusan perizinan Frekuensi Radio VHF Daerah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi informasi secara transparan. Sehingga mendapatkan umpan balik (feed back) guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ditahun yang akan datang.

Tarempa, 12 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



ABDUL KADIR, S.T., M.Si

Pembina Tk I / IV.b

NIP. 19750120 200312 1 008